

DOI <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v9i2.2813>

Peran Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Implementasi PTN-BH di Indonesia

Putri adibatur Rohmah¹, Ardiyana Muhammad^{2*}, Dinda Dwi Utami¹, Ilham Nur Hanifah Maulana³

¹Magister Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo, Sleman DIY.

²Pendidikan IPS, Fakultas Inovasi Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Jl. Cempaka Tanah Tinggi, Ternate.

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng. 62-64 Malang.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: ardiyanam93@gmail.com

Abstract – Higher education institutions (HEIs) are establishments that offer education, instruction, research, and services across fields of science and technology. Autonomy, in management, categorizes state universities (PTNs) based on their structure. State universities with status (PTN-BH) hold the position in resource management within the campus hierarchy of state universities. This study adopts an approach incorporating a literature review methodology and analysis through Michel Foucault's theory on the interplay between power and knowledge. This study aims to understand how power shapes the identity and norms of universities and to analyze the dynamics of HEIs in the context of economic priorities and their implications for democracy. The findings indicate that power influences the regulation of knowledge creation presenting both challenges and opportunities for PTN-BH. Michel Foucault's theory underscores how power shapes university identities and norms. The evolution of PTN-BH signifies a transition towards prioritizing concerns, over welfare, impacting democratic ideals.

Abstrak – Perguruan tinggi (PT) merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Otonomi pengelolaan membagi klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan manajemen pengelolaannya. Posisi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) merupakan posisi terpuncak dalam klasifikasi manajemen pengelolaan sumber daya suatu kampus untuk universitas negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature review, dengan analisis menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault mengenai hubungan kekuasaan dengan pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan membentuk identitas dan norma universitas, serta menganalisis dinamika PTN-BH dalam konteks prioritas ekonomi dan implikasinya terhadap demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan berperan dalam mengatur produksi pengetahuan sehingga menimbulkan tantangan dan peluang bagi PTN-BH. Teori Michel Foucault menyoroti peran kekuasaan dalam membentuk identitas dan norma universitas. Dinamika munculnya PTN-BH bisa dianggap mencerminkan pergeseran ke arah memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan sosial, yang memiliki implikasi bagi cita-cita demokrasi.

Keywords – Knowledge, Michel Foucault, Power, PTN-BH.

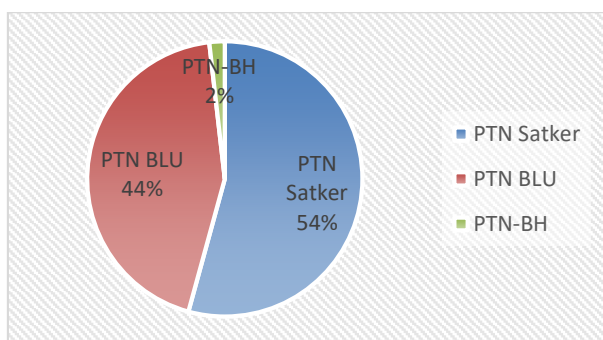
PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan tingkat pendidikan lanjutan yang menyediakan beberapa pilihan program jurusan. Perguruan tinggi (PT) merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berwenang dalam memberikan gelar kepada peserta didiknya (Chakrabarty & Singh, 2023). Dalam konteks ini, pendirian PT harus memiliki badan hukum dan izin operasional yang

disahkan oleh pemerintah dan dapat dievaluasi melalui lembaga akreditasi dan penjamin mutu seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Setiap PT harus bisa menyelenggarakan atau membentuk tata kelola dan kepemimpinan organisasi yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu organisasi (Undang-Undang No. 12 Tentang Perguruan Tinggi, 2012). Perguruan tinggi mempersiapkan sumber daya untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan pengembangan kemampuan akademis dan keterampilan. Tugas utama sebagai lembaga pendidikan adalah membentuk karakter dan mencetak lulusan berkualitas untuk mendukung kemajuan bangsa (Suastra, 2017). Dalam operasinya, perguruan tinggi mengacu pada prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Suryana, 2018).

Otonomi pengelolaan membagi klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan manajemen pengelolaannya. Otonomi pendidikan tinggi memberi perguruan tinggi kewenangan lebih untuk mengatur hal-hal akademik dan non-akademik secara lebih efektif, mempercepat pencapaian tujuan unggulan institusi. Proses status pengelolaan PTN dimulai dari transformasi PTN-Satker (Satuan Kerja Kementerian) menjadi PTN-BLU (Badan Layanan Umum), lalu menjadi PTN-BH (Badan Hukum) yang memungkinkan manajemen keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri (Romanti, 2023). PTN-BH adalah lembaga tinggi yang diberikan otonomi penuh oleh Pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri, seperti BUMN (Kawedar, 2017). Statusnya ditetapkan oleh pemerintah. Sementara PTN-BLU memiliki otonomi lebih rendah, penetapannya melalui Keputusan Menteri Keuangan dan pendapatannya dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PTN-Satker beroperasi di bawah Kementerian dengan semua pendapatannya masuk ke rekening negara (Kemendikbud, 2023).



Gambar 1. Diagram Jenis-jenis PTN di Indonesia
 Sumber: (Kemendikbud, 2023)

Pada gambar 1, menunjukkan bahwa jumlah PTN di Indonesia sebanyak 54% bergelar sebagai PTB-Satker, kemudian sebanyak 44% berstatus PTN-BLU dan sebanyak 2% telah berstatus PTN-BH. Posisi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) merupakan posisi terpuncak dalam klasifikasi manajemen pengelolaan sumber daya suatu kampus untuk universitas negeri. Dari jumlah 125 PT Negeri di Indonesia, 21 diantaranya telah menyandang gelar PTN-BH (BPS, 2022). PTN-BH memiliki kewenangan mandiri dalam mengelola lembaganya, termasuk keuangan. Berdasarkan statusnya PTN-BH yang memisahkan asetnya dari aset negara. Manajemen keuangannya berbeda dengan PTN-BLU yang terikat pada sistem APBN (Sugiharti, 2014). Meskipun masih menerima dana operasional dari pemerintah untuk Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan keuangan PTN-BH tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Penerimaan dan pengelolaan anggarannya masih bergantung pada alokasi dari pemerintah melalui kementerian terkait (Darlis et al., 2023).

Kebijakan PTN-BH menyebabkan statement pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Implementasi PTN-BH memberi otonomi dan tanggung jawab lebih besar pada lembaga terkait (Diyanto et al., 2021). Penyebaran inovasi dari perguruan tinggi melalui komersialisasi punya tantangan dan kelebihan, terutama terkait fungsi pendidikan tinggi. Namun, konsep PTN-BH mendorong semangat berwirausaha di perguruan tinggi, yang menciptakan wirausahawan selain pekerja bagi negara. Hasil temuan umumnya PT di Indonesia dipengaruhi teknologi bukan permintaan pasar (Benny Riyanto & Prajanti, 2023). Hal ini memungkinkan lembaga PT yang memiliki status badan hukum, meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui evaluasi kinerja. Namun, apabila evaluasi tidak memenuhi standar, bisa berdampak negatif dan proses penetapan status bisa bervariasi.

Transisi ke PTN-BH memerlukan penyesuaian dalam manajemen, tata kelola dan bisa membutuhkan lebih banyak sumber daya (Sutini, 2019). Kebijakan PTN-BH meningkatkan prestise PTN dibandingkan PT swasta karena reputasi pendidikan yang lebih baik. Meskipun dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan, kebijakan ini juga memiliki kekurangan. Komersialisasi pendidikan di PTN telah meningkatkan biaya Pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga dapat menjadikan beban bagi

mahasiswa kurang mampu. Fokus pada keuntungan finansial dapat mengabaikan tanggung jawab pendidikan, menciptakan perbedaan akses bagi yang mampu membayar biaya tinggi (Saputra, 2023).

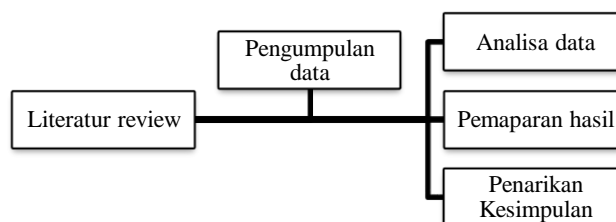
Teori kekuasaan Michel Foucault dapat memberikan bantuan dalam mengidentifikasi berbagai kegagalan dan menganalisis dampak-dampak implementasi PTN-BH. Teori Kekuasaan Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan sudah mendarah daging ditengah kehidupan masyarakat (Norman, 2023). Penekanannya pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menawarkan perspektif unik tentang bagaimana kekuasaan beroperasi dan mempengaruhi dinamika sosial sehingga pengetahuan tidak bisa netral dan murni, menunjukkan bahwa kekuatan melekat dalam pengetahuan dan sebaliknya (Pløger, 2023). Michel Foucault memisahkan pandangan struktur sosialnya dari kategori mental, melihatnya sebagai kode yang dapat memecah dan menciptakan peristiwa baru dalam peristiwa diskursif (Reckwitz, 2002). Foucault menggunakan konsep kekuasaan dan pengetahuan sebagai pembentuk identitas dan praktik melalui pengakuan kesalahan dengan melihat dinamika implementasi kekuasaan. Wacana refleksi dianggap membatasi variasi pandangan, menghambat inovasi pemikiran (Siregar, 2021). Michel Foucault menekankan perlunya meninjau kembali refleksi sebagai kebenaran, untuk menciptakan perspektif alternatif dan perubahan positif. Pemikiran kritis terhadap refleksi sosial diperlukan untuk mempertanyakan pengetahuan diterima dan dampak yang tersembunyi (Cushion, 2018).

METODE

Desain penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, dengan Kajian *Literature Review* dalam telaah literatur yang komprehensif dan mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan topik. Melalui analisis mendalam terhadap kumpulan literatur, ditemukan titik fokus penelitian yang esensial serta identifikasi terhadap kelangkaan informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut (Sugiyono, 2016). *Literature review* merupakan reka kegiatan peninjauan tulisan akademis dengan melakukan analisis kritis terhadap penelitian terbaru dalam semua bidang, tujuan analisis kritis dalam *Literature review* guna untuk menemukan gap dan menggeneralisasikan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Taherdoost, 2023). Tinjauan literatur menggambarkan serangkaian kegiatan yang mencakup, 1) menghimpun data atau informasi, 2)

mengevaluasi data, teori, informasi atau hasil riset, dan 3) menganalisis publikasi seperti buku, artikel penelitian atau materi lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya (Cahyono et al., 2019).

Pada penelitian ini kajian *Literature review* dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal yang ada pada *database* google scholar, Mendeley, scopus dan WoS. Melalui kata kunci “Michel Foucault”, “Power”, “Knowledge”, “PTN-BH”, dll. Alur analisis pada kegiatan *Literature review* terdapat pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Proses Penelitian *Literature review*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Michel Foucault mengemukakan bahwa mekanisme pemerintahan bukan hanya berfungsi untuk mengontrol tetapi juga membentuk subjek individu dan kolektif. Keterkaitan yang erat antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi landasan bagi pandangannya (Lorenzini, 2023). Baginya, pengetahuan memegang peran sebagai kekuatan, sedangkan kekuasaan menentukan validitas dari apa yang diakui sebagai pengetahuan yang sah (Kuecker & Hartley, 2020). Dalam konteks implementasi PTN-BH, konsep Foucault ini menyoroti cara kekuasaan diimplementasikan melalui peran pemerintahan yang terfokus pada pemberian otonomi pengelolaan kepada PTN, hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan mempengaruhi pusat produksi pengetahuan.

Kekuasaan Melalui Otonomi Khusus PTN-BH

Otonomi dalam PTN-BH memberikan akses keleluasaan kendali kepada PTN dalam pembentukan kurikulum, keputusan internal, penelitian dan pengabdian. Struktur hukum PTN-BH memperbolehkan adaptasi organisasi fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proyeksi perkembangan masing-masing PTN-BH (Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Otonomi PTN-BH memberi keleluasaan bagi lembaga untuk mengelola sumber daya dan keputusan, memberikan kontrol

yang lebih besar atas manajemen akademik. Hal ini mencakup pemilihan dosen dan staf pendidikan serta memungkinkan penyelenggaraan dan pelaksanaan program studi sesuai visi lembaga. Selain itu, keleluasaan ini juga memungkinkan pengelolaan dana secara transparan, mendukung manajemen keuangan yang efisien dan menjamin akuntabilitas keuangan melalui unit khusus (Indra et al., 2020).

Setiap unit PTN-BH telah menciptakan Renstra (rencana strategis). Perencanaan strategis di universitas bertujuan untuk transformasi menyeluruh dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan etika. Rencana ini melibatkan struktur universitas, memperbaiki hubungan antar bagian ilmiah dan administratif. Visi dan misi universitas diintegrasikan dengan strategi di semua tingkat, dengan rencana koordinasi jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan (Hassanien, 2017).

Dalam implementasi kurikulum pembelajaran, PTN-BH tengah berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa lembaga PTN dengan mensosialisasikan berbagai program kegiatan kampus yang sejalan dengan tujuannya menjadi bagian dari *World Class University* (WCU), misalnya dengan program transfer kredit mahasiswa, kolaborasi antar universitas (nasional dan internasional), sosialisasi dan pelatihan publikasi jurnal ilmiah dan lainnya (Barnett, 2020). Sedangkan dalam kebijakan penelitian akademisi, PTN-BH menekankan tiga fokus utama yaitu pergeseran ke penelitian strategis dalam Tridharma, skema pembiayaan khusus dan sistem jaminan mutu. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan partisipasi dalam penelitian, penguatan integritas akademik, serta penentuan domain pengembangan dan target inovasi yang strategis (Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Hal ini memastikan fokus pada penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, hingga saat ini PTN-BH tengah berupaya bertransformasi dari *Teaching university ke Research University* atau mengusung keduanya (Bramastia et al., 2023).

Perubahan Identitas dan Norma PTN-BH

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan adalah kekuatan pendorong utama dalam transformasi perubahan identitas dan norma pada Perguruan tinggi hukum (Jss Mertek, 2020). Kekuasaan ada di mana-mana dan menghasilkan kebenaran melalui wacana, mengadopsi kebenaran yang dihasilkan melalui penindasan dan kontrol (Patton, 2017). Perguruan tinggi, sebagai pusat pengetahuan, secara langsung dipengaruhi oleh kekuasaan (Bazzul &

Carter, 2017). Foucault menghubungkan kekuatan dan pengetahuan, melihatnya sebagai tidak dapat dipisahkan dan selalu terkait satu sama lain (Slović, 2019). Kekuasaan atau pengetahuan bersifat produktif dan membatasi (Jobe, 2017). Kekuasaan dilaksanakan melalui sarana disiplin di berbagai institusi, termasuk PTN. Konsepsi Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan cocok dengan kritiknya terhadap saat ini, dimana tidak ada kebenaran objektif dan tidak ada pandangan universal tentang dunia. Oleh karena itu, kekuasaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan norma, karena mempengaruhi produksi pengetahuan dan pelaksanaan kekuasaan disipliner (Slović, 2019).

Perubahan identitas dan norma di Universitas yang berstatus PTN-BH menandai transformasi signifikan dalam pendekatan operasional, fungsional dan manajemen organisasi. Pendekatan operasional dalam manajemen menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara pendekatan fungsional mengintegrasikan pekerjaan individu secara optimal dalam operasi keseluruhan organisasi (Abdulrahman et al., 2013).

Manajemen PTN harus berfokus pada penyelarasan aturan, penyederhanaan administrasi dan penegakan regulasi Rektor untuk meningkatkan efisiensi. PTN-BH mengevaluasi program studi untuk sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang diadaptasikan dengan visi-misi setiap PT (Sunandar, 2016). PTN-BH sering mengadakan acara akademik dan memprioritaskan bidang seperti pertanian, maritim, kesehatan, alat medis dan nanoteknologi. Namun, dalam mengembangkan bidang non-sains dan teknologi serta kerja sama industri pendidikan menjadi tantangan. Alokasi anggaran penelitian didasarkan pada proposal tanpa peta jalan riset yang jelas. Evaluasi sebagai *Center of Excellence* merekomendasikan penyelarasan aturan, simplifikasi administrasi dan penegasan regulasi rektor (Fachriansyah et al., 2020).

Awalnya, fokus PT lebih pada aspek akademik. Namun kini, lebih diprioritaskan manajemen keuangan serta pencapaian target bisnis. Privatisasi perguruan tinggi, yang mencerminkan pergeseran dari fokus akademik ke manajemen keuangan dan bisnis, diimplementasikan melalui pembentukan Badan Hukum Negara (PTN-BH) untuk memberikan otonomi keuangan kepada PT (Anggraini & Jaya, 2019). Meskipun memberi kesempatan untuk berinovasi dan keberlanjutan finansial, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran

terhadap komersialisasi pendidikan, terutama dalam konteks neoliberalisme dimana pertimbangan ekonomi dan pasar memegang peran sentral. Evaluasi yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa otonomi finansial tidak mengorbankan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua, serta mempertahankan nilai-nilai akademik yang esensial dalam pendidikan tinggi (Ansar & Alam, 2019).

Perubahan dalam struktur PTN yang lebih mengedepankan efisiensi dan faktor ekonomi menyoroti perubahan signifikan dalam pola interaksi antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya (Bozkurt, 2023). Pengaruh dari ide-ide neoliberal dan konsep pasar, manajemen, serta teknologi kinerja telah menciptakan model manajemen baru di lembaga pendidikan tinggi. Pergeseran ini menunjukkan peralihan fokus dari yang awalnya tidak berorientasi pada pasar menjadi lebih terfokus pada pasar, dari proses pertukaran menjadi lebih kompetitif, dan dari pandangan bahwa pasar adalah sesuatu yang alami menjadi sesuatu yang dianggap sebagai tujuan ideal (Dholakia et al., 2020). Konsekuensinya, otonomi profesional akademisi mengalami penurunan sedikit, sementara budaya manajemen lebih mendominasi lingkungan organisasi PT. Perubahan ini mencerminkan kecenderungan masyarakat yang semakin meragukan peran negara, serta dampak dari globalisasi dan organisasi internasional (Diogo et al., 2019).

Pelaksanaan status PTN menghadapi tantangan ketika tujuan pendidikan bertabrakan dengan keterbatasan anggaran (Kiselev et al., 2021). Meskipun terjadi peningkatan yang berkelanjutan dalam Standar Pendidikan Tinggi, hal tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan utama terkait kebutuhan akan pelatihan profesional yang diminta oleh industri domestik (Vlasova, 2019). Modernisasi pendidikan melalui PTN-BH harus mempertimbangkan karakteristik khusus wilayah, kebutuhan sosial, persyaratan ekonomi, dan juga infrastruktur. Kolaborasi yang berhasil antara stakeholder universitas dapat berperan dalam mengarahkan standardisasi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, universitas perlu menemukan keseimbangan untuk mempertahankan misi pendidikan sambil menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang terus berlangsung.

Dinamika dan Dampak Kekuasaan PTN-BH pada Akses Pendidikan

Implementasi perguruan tinggi yang berbasis hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang

berasal dari faktor-faktor beragam. Salah satunya adalah ketidakpastian penegakan hukum terhadap individu yang melanggar aturan dan berdampak pada kerusakan lingkungan, menghambat kesuksesan kebijakan pembangunan berkelanjutan (Rusli, 2020). Selain itu, perubahan bentuk lembaga PTN menjadi badan hukum meminta para pemimpin untuk mengelola dan mengevaluasi kebijakan strategis di berbagai bidang, termasuk yang tidak terkait dengan akademis (Herawati et al., 2022).

Langkah lainnya adalah implementasi konsep "Kampus Merdeka" yang bertujuan memberikan lebih banyak kebebasan kepada PTN dengan mengubah statusnya dan menyederhanakan proses akreditasi pendidikan tinggi, serta mendorong kolaborasi dengan industri (Umar & Akbal, 2019). Semua perubahan ini dirancang untuk meningkatkan daya saing dan otonomi institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Pentingnya Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam memastikan kesesuaian hukum dengan konstitusi melalui peninjauan yudisial, menekankan perlunya undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat (Aliyah et al., 2023). Secara keseluruhan, dinamika implementasi perguruan tinggi yang dibentuk secara hukum di Indonesia melibatkan perlindungan lingkungan, kepemimpinan strategis, otonomi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusi.

Konsep PTN-BH dapat memicu ketidakselarasan kolaborasi antar kepentingan *stakeholder* (civitas, masyarakat, alumni, dan LSM) (Sagara & Yustini, 2019). mengungkapkan bahwa pengelolaan PTN-BH, masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah, terutama dalam hal otonomi akademik. Bahkan dalam aspek non-akademik seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan dan kerja sama internasional, otonomi di PTN-BH belum sepenuhnya terwujud. Otonomi memainkan peran krusial dalam memberikan PTN-BH kontrol lebih besar terhadap urusan akademik dan non-akademik, yang berdampak pada peningkatan pengambilan keputusan dan tingkat akuntabilitas.

PTN-BH memiliki kewenangan mandiri dalam pengelolaan institusi, termasuk keuangan, sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun, otonomi ini juga berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu kekurangan PTN-BH adalah potensi komersialisasi yang bisa membuat pendidikan sulit diakses oleh masyarakat. Fokus pada pengelolaan keuangan dapat mengorbankan misi utama pendidikan, sementara biaya kuliah yang terus naik memperumit akses pendidikan. Proses menjadi

PTN-BH pun tidak mudah karena persyaratan yang ketat dari pemerintah. Meskipun pemisahan aset memberikan kebebasan, hal ini juga bisa membawa konsekuensi hukum yang rumit bagi institusi tersebut (Darlis et al., 2023).

Dampak Kekuasaan PTN-BH pada Akses Pendidikan

Dampak kekuasaan PTN-BH pada akses pendidikan mencerminkan pergeseran dalam jangkauan dan ketersediaan pendidikan bagi masyarakat. Transformasi status hukum perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara telah menyebabkan perubahan dalam struktur institusi, termasuk pergeseran norma tata kelola, prosedur dan organisasi (Herawati et al., 2022). Perubahan ini menimbulkan tantangan sosial terkait dengan dinamika antar-struktural dalam aktivitas akademik di lingkungan kampus, dengan beberapa mahasiswa menganggap kapitalisme dalam pendidikan tinggi sebagai permasalahan sentral (Singgih et al., 2022).

Di samping itu, dominasi politik dari elit kampus yang oportunis dalam sistem pendidikan telah menghambat usaha untuk meningkatkan hasil belajar dan menghasilkan tenaga kerja terampil (Mahendra et al., 2022). Sebagai respons terhadap tantangan ini, strategi nasional dalam sistem pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan daya saing institusi pendidikan tinggi Indonesia melalui restrukturisasi dan peningkatan kredibilitas (Rosser et al., 2022).

Keberadaan PTN-BH membawa inovasi dan fleksibilitas dalam manajemen keuangan dan operasional. Namun, ada risiko komersialisasi pendidikan yang dapat meningkatkan biaya pendidikan dan membuat masyarakat sulit untuk mencapainya (Mulyani et al., 2023). Fokus pada pencapaian target keuangan di pendidikan tinggi sering menyebabkan kurangnya akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, sehingga sulit bagi individu untuk memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kenaikan biaya kuliah dan pembatasan akses yang lebih luas (Salmi, 2018).

Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan ini dan menghilangkan hambatan untuk akses dan keberhasilan dalam pendidikan tinggi (Goastellec & Välimaa, 2019). Akses ke pendidikan tinggi secara historis telah digunakan sebagai alat untuk stratifikasi sosial dan tata kelola teritorial,

menghasilkan ketidaksetaraan yang bertahan hingga saat ini (Tejani, 2021). Munculnya PTN-BH bisa dianggap mencerminkan pergeseran ke arah memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan sosial, yang memiliki implikasi bagi cita-cita demokrasi. Untuk memastikan kesempatan pendidikan yang sama, lembaga harus mengatasi praktik defisit dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan akses, kesetaraan dan kesuksesan bagi semua peserta didik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan langkah penting dalam perubahan pendidikan tinggi di Indonesia. Implementasi PTN-BH memberikan otonomi yang lebih besar bagi institusi pendidikan, memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar namun juga menimbulkan kekhawatiran akan komersialisasi pendidikan. Pendekatan yang diambil dalam implementasi PTN-BH mempengaruhi tata kelola, orientasi terhadap pasar dan interaksi antara *stakeholder*.

Konsep Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan menjadi relevan dalam konteks ini, menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan identitas dan norma, serta konsekuensi dari implementasi PTN-BH terhadap akses pendidikan. Oleh karena itu, baik keberhasilan maupun kekurangan PTN-BH perlu diperhatikan secara cermat dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan langkah penting dalam perubahan pendidikan tinggi di Indonesia. Implementasi PTN-BH memberikan otonomi yang lebih besar bagi institusi pendidikan, memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar namun juga menimbulkan kekhawatiran akan komersialisasi pendidikan.

Pendekatan yang diambil dalam implementasi PTN-BH mempengaruhi tata kelola, orientasi terhadap pasar dan interaksi antara *stakeholder*. Konsep Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan menjadi relevan dalam konteks ini, menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan identitas dan norma, serta konsekuensi dari implementasi PTN-BH terhadap akses pendidikan. Oleh karena itu, baik keberhasilan maupun kekurangan PTN-BH perlu

diperhatikan secara cermat dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

REFERENSI

- Abdulrahman, S., Haruna Danja, K., & Ibrahim, Y. (2013). *Operational Approach, Functional Approach And Development Of Management In 21 St Century*. In *African Multidisciplinary Journal* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.africanmjournals.com/journal/>.
- Aliyah, H., Anif, M., Warisno, A., Andari, A. A., & Anshori, A. (2023). *Implementation of Islamic Higher Education Development Management in Indonesia*. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 8(1). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v8i1.10952>.
- Anggraini, D. S., & Jaya, U. B. (2019). Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 33–52. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/62/36/108>.
- Ansar, M. C., & Alam, A. S. (2019). Analisis Neoliberalisme dalam Good University Governance di Universitas Hasanuddin. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu ...*, 11.
- Barnett, R. (2020). *Realizing the World-Class University: An Ecological Approach* (S.P.M. A. H. M. B. T. (eds) In: Rider (ed.); 1st ed.). *Evaluating Education: Normative Systems and Institutional Practices*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7598-3_16
- Bazzul, J., & Carter, L. (2017). *(Re)considering Foucault for science education research: considerations of truth, power and governance*. *Cultural Studies of Science Education*, 12(2). <https://doi.org/10.1007/s11422-016-9800-2>.
- Benny Riyanto, R., & Prajanti, S. D. W. (2023). *The Grand Design of LPPM UNNES Innovation in Supporting UNNES Towards PTN-BH*. In *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_137.
- Bozkurt, S. (2023). *Does Institutional Autonomy Guarantee Academic Freedom*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5929-4.ch004>.
- BPS. (2022). Jumlah Perguruan Tinggi1, Dosen, dan Mahasiswa2 (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/indikator/indikator>.
- Bramastia, B., Totalia, S. A., & Swastike, W. (2023). Analisis Kebijakan Penelitian Uns Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.3820>.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). *Literature review: Panduan Penulisan dan Penyusunan*. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 1–4.
- Chakrabarty, A., & Singh, A. K. (2023). *Strategic Reforms in the Higher Education Research Ecosystem in India*. *Higher Education for the Future*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/23476311231152292>.
- Cushion, C. J. (2018). *Reflection and reflective practice discourses in coaching: a critical analysis*. *Sport, Education and Society*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/13573322.2016.1142961>.
- Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Rahmi, R., Laoli, P., Lestari, I., & Kunci, K. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/2921>.
- Dholakia, N., Firat, A. F., Ozgun, A., & Atik, D. (2020). *Challenges for the University: Recovering Authentic Liberal Culture During Ascendant and Populist Neoliberalism*. In *Populism and Higher Education Curriculum Development: Problem Based Learning as a Mitigating Response*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47376-1_3.
- Diogo, S. M. A., Barbosa, M. A. C., & Carvalho, M. T. G. (2019). *An International Comparative Perspective on Higher Education Institutions' Governance and Management—Portugal, Finland, and Brazil*. In *Intercultural Studies in Higher Education*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15758-6_5.
- Diyanto, C., Putranti, I. R., Yuwono, T., & Yuniningsih, T. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi Dan Komersialisasi. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.7574>.
- Fachriansyah, K., Perencanaan, B., Nasional, P., & Sulastri, E. (2020). Evaluasi Pengembangan PTN-BH sebagai Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*). In *Bappenas*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21825.92007>.

- Goastellec, G., & Välimaa, J. (2019). *Access to higher education: An instrument for fair societies? In Social Inclusion* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.17645/si.v7i1.1841>.
- Hassanien, M. (2017). *Strategic Planning in Higher Education, a Need for Innovative Model. Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 23(2), 1–11. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2017/37428>.
- Herawati, N. R., Raharjo, T. J., Sugiyo, & Masrukhi. (2022). *Strategic Leadership in Governance of Legal Entity State Universities in Indonesia. Proceedings of the 6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)*, 574. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211125.050>.
- Indra, V., Nasution, A., Prasajo, E., Jannah, L. M., & Yumitro, G. (2020). *Governance of Autonomous Higher Education Institution Toward World-Class University: A Case Study at the Universitas Indonesia. Journal of Critical Reviews*, 7(10).
- Jobe, K. S. (2017). *Foucault and the Telos of Power. Critical Horizons*, 18(3). <https://doi.org/10.1080/14409917.2017.1293888>.
- Jss Mertek, G. (2020). *Bilgi ve İktidar Kısacasında Üniversiteler ve Sosyal Bilimler: Foucaultcu Bir Yaklaşım. In Gaziantep University Journal of Social Sciences* (Vol. 19, Issue 1).
- Kawedar, W. (2017). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaL Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Analisis Deskriptif Kualitatif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19241>.
- Kemendikbud. (2023). Klasterisasi Perguruan Tinggi 2023. <https://lldikti15.kemdikbud.go.id/>
- Kiselev, A., Ugryumova, M., Sazonov, A., & Savicheva, A. (2021). *Problems of the Shaping Universal and professional competencies among students of Domestic Universities in the implementation of the federal state educational standard of higher education 3++ and ways to solve them. SHS Web of Conferences*, 101. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110103033>
- Kuecker, G. D., & Hartley, K. (2020). *How Smart Cities Became the Urban Norm: Power and Knowledge in New Songdo City. Annals of the American Association of Geographers*, 110(2). <https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1617102>.
- Lorenzini, D. (2023). *Foucault, governmentality, and the techniques of the self. In Handbook on Governmentality*. <https://doi.org/10.4337/9781839108662.00008>
- Mahendra, S., Kubota, E., Rama, N. R., & Junaidi, M. (2022). *Implementation of Law Number 18 of 2019 on Access to Education for Graduates of Muhammadiyah Boarding School Klaten at State Universities. Journal of Transcendental Law*, 3(2), 141–155. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.18509>.
- Mulyani, E., Alwi, A. C., Afandi, M. R., & Supriyanto, S. (2023). *Predicting Entrepreneurial Readiness at PTN-BH Universities Based On Their Mindset And Motivation. Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/Jk.V7i1.58570>.
- Norman, H. (2023). *Knowledge Is Power. Electric and Hybrid Rail Technology*, 1. [https://doi.org/10.12968/S2754-7760\(23\)70108-4](https://doi.org/10.12968/S2754-7760(23)70108-4).
- Nurhanifah, I., & Kusdarini, E. (2022). *The Policy of Legal-Entity State Higher Education Institutions (PTN-BH) Determination Viewed from Material Law Institutions. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/Idj.V3i1.31004>.
- Patton, P. (2017). *Foucault's Subject of Power. In Michel Foucault*. <https://doi.org/10.4324/9781315249032>.
- Pløger, J. (2023). Michel Foucault, *Power and Planning. In Handbook On Planning and Power*. <https://doi.org/10.4337/9781839109768.00011>.
- Reckwitz, A. (2002). *Toward A Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory*, 5(2). <https://doi.org/10.1177/13684310222225432>.
- Romanti. (2023, September 16). Mengenal Lebih Lanjut PTN-Satker, PTN-BLU, Dan PTN BH. Itjen Kemendikbud. <https://itjen.kemdikbud.go.id>.
- Rosser, A., King, P., & Widoyoko, D. (2022). *The Political Economy of The Learning Crisis In Indonesia. Political Economy Paper*.
- Rusli, Z. (2020). *Dynamics Policy of Sustainable Development in Indonesia. Melayunesia Law*, 4(2). <https://doi.org/10.30652/ML.V4i2.7778>.
- Sagara, Y., & Yustini, S. (2019). Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/Akt.V12i2.13226>.

- Salmi, J. (2018). *All Around The World - Higher Education Equity Policies Across The Globe. Global Tertiary Education Expert, November.*
- Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. *Journal On Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2153>.
- Singgih, D. S., Suyanto, B., & Ariadi, S. (2022). *Higher Education Capitalism in Indonesia as A Social Problem: A Case Study in The Digital Age.* *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1). <https://doi.org/10.20473/jsd.v17i1.2022.13-24>.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–12. <https://journal.uwks.ac.id>.
- Slović, S. (2019). *Foucault's Concept of The Relationships Between Power And Knowledge.* *Bastina*, 47. <https://doi.org/10.5937/bastina1947199s>.
- Suastra, I. W. (2017). Melindungi Guru Dalam Pengembangan Karakter Siswa Untuk Menjaga Keutuhan Dan Kemajuan Bangsa. *2nd Annual Proceeding*, 1–17. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:197965762>.
- Sugiharti, D. K. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a4>.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Rnd.* Alfabeta.
- Sunandar, A. (2016). *Manajemen Perguruan Tinggi* (Ed 1). Universitas Negeri Malang.
- Suryana, S. (2018). Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 2(2).
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH Yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction*, Vol. 2(No.5), 1765–1779. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15242>.
- Taherdoost, H. (2023). *Towards Nuts and Bolts of Conducting Literature Review: A Typology of Literature Review.* *In Electronics (Switzerland)* (Vol. 12, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/electronics12040800>.
- Tejani, R. (2021). *Legal Education for Profit and The United Nations Call for "Quality Education" And "Strong Institutions" In The 2030 Sustainable Development Agenda.* *In Crime Prevention and Justice in 2030: The UN and The Universal Declaration of Human Rights.* https://doi.org/10.1007/978-3-030-56227-4_22.
- Umar, F., & Akbal, M. (2019). *The Dynamics Implementation of Judicial Review by The Constitutional Court In Indonesia.* <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.226>.
- Undang-Undang No. 12 Tentang Perguruan Tinggi, Pub. L. No. 12, Pemerintah Indonesia 1 (2012).
- Vlasova, I. (2019). *Financial Autonomy of Universities: Experience of Georgia.* *Osvitohiia*, 8. <https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.4349>.